

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buntar

Noviana Eka Permatasari¹, LMS. Kristiyanti²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia.

Alamat Email:

ekapermatasarinoviana@gmail.com¹, lms.kristiyanti@yahoo.co.id²

Sitasi Artikel:

Permatasari, N. E., & Kristiyanti, LMS., (2023). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buntar. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 2(3), 420-429.

Abstract: *This study aims to determine the Effect of Financial Management Accountability of Village Funds, Village Policy and Community Participation on Community Welfare in the Study of Buntar Village, Mojogedang District, Karanganyar Regency. The population in this study was the entire Buntar Village community. The sample was taken using a purposive sampling technique of 80 respondents with analysis using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the accountability variable has a significant effect on the community welfare variable. Village policy variables indicate that village policy variables have a significant effect on community welfare variables. The community participation variable shows that the community participation variable has no significant effect on the community welfare variable. It can be concluded that simultaneously accountability for financial management of village funds, village policies and community participation significantly affect people's welfare.*

Keywords: *Village Fund Financial Management Accountability, Village Policy, Community Participation, Community Welfare.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat studi Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Buntar. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 80 responden dengan analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Variabel kebijakan desa menunjukkan bahwa variabel kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Variabel partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat signifikan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat.*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi adalah parameter penting dalam menilai kondisi perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dianggap sebagai prasyarat utama bagi kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pembangunan merujuk pada proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat (Bustaman, *et al.*, 2021).

Kesejahteraan adalah indikator penting bagi suatu masyarakat untuk menilai tingkat keberhasilannya dalam mencapai keadaan sejahtera. Ini tercermin dari faktor-faktor seperti kesehatan, keuangan, kebahagiaan, dan kualitas hidup warganya. Secara umum, masyarakat menganggap bahwa sebuah keluarga yang sejahtera mampu memberikan pendidikan yang baik bagi anggota keluarganya. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat membawa dampak positif, seperti kesempatan kerja yang lebih baik dan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kesejahteraan merupakan tujuan utama bagi setiap keluarga, yang berarti kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan dasar agar dapat hidup dengan layak, sehat, dan produktif (Mulia, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan dana sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana yang didapatkan ini dinamakan dana desa. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2016 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat (Fahri, 2017).

Menurut Pasal 71(1) UU No. 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang diukur dengan uang dan segala sesuatu yang

berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dana desa dikelola dengan baik apabila memenuhi beberapa prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa, partisipasi masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Yupita & Juita (2020); Nestiti, *et al.*, (2022); menyatakan bahwa ketiga prinsip tersebut berpengaruh positif dan signifikan.

Hasanah *et al.*, (2020) mengungkapkan bahwa Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa. Namun, permasalahan pengelolaan keuangan desa yang tidak efektif dan efisien telah menjadi sorotan publik. Kasus penyelewengan dan korupsi dana desa juga telah mencuat dimedia masa. Kajian tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh KPK (2015) memperoleh hasil bahwa terdapat potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dilihat dari masalah tata laksana yaitu (1) kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, (2) APB Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, (3) transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa masih rendah, dan (4) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum sepenuhnya mengikuti standar dan rawan manipulasi.

Kebijakan desa merupakan salah satu bentuk kebijakan yang harus disusun oleh aparat desa untuk menjalankan tanggungjawab desa yang tetap berada dalam pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Dalam setiap desa mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan setiap desa mempunyai norma atau aturan yang berbeda. Maka, setiap desa menentukan sendiri dan menetapkan kebijakannya sendiri. Dalam menentukan dan



menetapkan kebijakan desa ada partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam pembuatan kebijakan desa tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat berperan positif dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis, karena keinginan masyarakat dapat menjadi semacam arahan dalam penggunaan dana. Apabila suatu desa menerapkan prinsip partisipasi yang baik, maka pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan optimal. Selain peran penting partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum terpenuhi menyebabkan ketertinggalan baik secara ekonomi maupun kehidupan. Oleh sebab itu, segala upaya diusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pemerataan pembangunan melalui kebijakan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di pedesaan. Pembangunan desa sebagai subjek pembangunan, dan juga sebagai gerakan masyarakat melaksanakan pembangunan yang dilandasi kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kehidupan yang semakin membaik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa, partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Buntar.

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Akuntabilitas

Menurut Halim (2012), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan

pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertical maupun horizontal.

2.2. Kebijakan Desa

Kebijakan adalah suatu ketentuan dan pedoman yang dianut dan ditentukan dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan desa adalah salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki hak atau wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri (Dura, 2016).

Kebijakan desa tertuang di dalam peraturan desa yang berlaku di wilayah desa. Peraturan desa bukan untuk menjalankan otonomi secara independen tetapi tanggung jawab otonomi karena desa tetap berada pada pengawasan pemerintah kabupaten/kota. Meskipun demikian, desa berwenang untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum dan pembangunan desa secara khusus (Novitasari, 2019).

2.3. Partisipasi Masyarakat

Menurut Dewi *et al.*, (2013) partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan.

2.4. Kesejahteraan Masyarakat

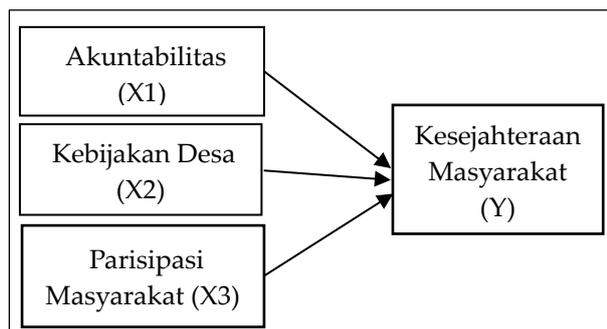
Kesejahteraan menurut bahasa adalah keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Kesejahteraan dipandang sebagai suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Menurut Nurohman *et al.*, (2019) kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih



baik.

2.5. kerangka pemikiran

Hasil kerangka pemikiran pada penelitian yang dibangun adalah berkaitan dengan pajak daerah (PD), retribusi daerah (RD) dan dana perimbangan (DP) terhadap belanja modal (BM), yang dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Sumber: Berbagai penelitian terdahulu, 2023

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat
- H2: Kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat
- H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Metode Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk yang berada di wilayah desa Buntar yang terdiri dari 26 RT. Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan cara purposive sampling. Dan menghasilkan jumlah data sampel yaitu sebanyak 80 responden. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang di dapat langsung dari subjek dan data ini merupakan data primer (kuisisioner). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dan studi dokumentasi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan penggunaan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda program SPSS.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas

Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Hasil
1	0,638	0,2199	Valid
2	0,758	0,2199	Valid
3	0,728	0,2199	Valid
4	0,780	0,2199	Valid
5	0,751	0,2199	Valid
6	0,601	0,2199	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2023.

Nilai R_{tabel} untuk populasi dalam penelitian ini sebanyak 80 responden dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan df = n-2, df = 80-2=78 maka df=78 adalah 0,2199. Jadi apabila R_{hitung} lebih dari 0,2199 maka dianggap tidak valid. Berdasarkan hasil pengujian validitas variabel akuntabilitas yang ada pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa 6 pernyataan tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kebijakan Desa

Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Hasil
1	0,862	0,2199	Valid
2	0,870	0,2199	Valid
3	0,811	0,2199	Valid
4	0,834	0,2199	Valid
5	0,776	0,2199	Valid
6	0,756	0,2199	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2023.

Nilai R_{tabel} untuk populasi dalam penelitian ini sebanyak 80 responden dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan df = n-2, df = 80-2=78 maka df=78 adalah 0,2199. Jadi apabila R_{hitung} lebih dari 0,2199 maka dianggap tidak valid. Berdasarkan hasil pengujian validitas variabel kebijakan desa yang ada pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa 6 pernyataan tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat

Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Hasil
1	0,687	0,2199	Valid
2	0,779	0,2199	Valid
3	0,749	0,2199	Valid
4	0,788	0,2199	Valid
5	0,763	0,2199	Valid
6	0,800	0,2199	Valid

Nilai R_{tabel} untuk populasi dalam penelitian ini sebanyak 80 responden dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan df = n-2, df = 80-2=78 maka df=78 adalah 0,2199. Jadi apabila R_{hitung} lebih dari 0,2199



maka dianggap tidak valid. Berdasarkan hasil pengujian validitas variabel partisipasi masyarakat yang ada pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa 6 pernyataan tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kesejahteraan Masyarakat

Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Hasil
1	0,834	0,2199	Valid
2	0,754	0,2199	Valid
3	0,817	0,2199	Valid
4	0,688	0,2199	Valid
5	0,809	0,2199	Valid
6	0,813	0,2199	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2023.

Nilai R_{tabel} untuk populasi dalam penelitian ini sebanyak 80 responden dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan $df = n-2$, $df = 80-2=78$ maka $df=78$ adalah 0,2199. Jadi apabila R_{hitung} lebih dari 0,2199 maka dianggap tidak valid. Berdasarkan hasil pengujian validitas variabel kesejahteraan masyarakat yang ada pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa 6 pernyataan tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

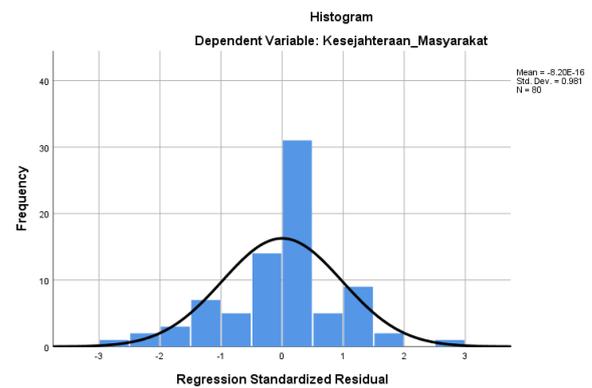
Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Akuntabilitas	0,801	0,6	Reliabel
Kebijakan Desa	0,902	0,6	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,850	0,6	Reliabel
Kesejahteraan Masyarakat	0,874	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil olah data, 2023.

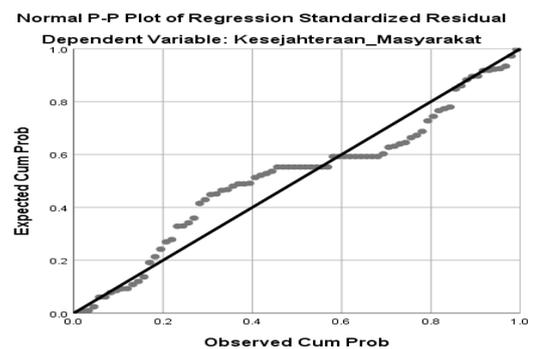
Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian reliabilitas, nilai cronbach's alpha dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,6. Maka seluruh pernyataan dari masing-masing variabel dikatakan reliabel, sehingga dapat dipastikan bahwa semua pernyataan lolos dalam uji validitas dan uji reliabilitas.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil olah data, 2023.

Gambar 3. Hasil Uji Normaslititas



Sumber: Hasil olah data, 2023.

Berdasarkan gambar 2 dan 3 maka dapat disimpulkan bahwa grafik normal P.P plot terlihat titik-titik menyebar disekitar aris diagonal dan penyebarannya mengikuti arah diagonal, maka grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistik	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Akuntabilitas (X1)	0,284	3,517
Kebijakan Desa (X2)	0,213	4,703
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,185	5,407

Sumber: Hasil olah data, 2023.

Dari tabel 6 diatas menjelaskan bahwa nilai toleransi setiap variabel > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolineritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Du	DI	Durbin-Watson
1	1,715	1,560	1,867

Sumber: Hasil olah data, 2023.



Pada tabel 4.10 diketahui nilai DW yaitu 2,334 selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson dimana jumlah data n=80 dan jumlah variabel independen K=3 maka diperoleh Du=1,715 dan Dl=1,5600. Maka, nilai Durbin-Watson lebih besar dari batas atas (dU) dan kurang dari (4-dU) $4 - 1,715 = 2,285$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi dalam penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	B	Standar Error
Konstanta	0,387	1,400
Akuntabilitas	0,589	0,115
Kebijakan Desa	0,281	0,123
Partisipasi masyarakat	0,092	0,140

Sumber: Hasil olah data, 2023.

Hasil uji analisis regresi linear berganda yang peneliti lakukan dalam variabel akuntabilitas (X1), kebijakan desa (X2), partisipasi masyarakat (X3) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). diketahui nilainya dapat digambarkan persamaan regresi berganda berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$\text{Nilai } Y = 0,387 + 0,589X_1 + 0,281X_2 + 0,092X_3 + e$$

Pengaruh akuntabilitas (X1) secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat (Y)

Dari hasil pengolahan data pada uji analisis regresi berganda diperoleh nilai koefisien regresi akuntabilitas (X1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) adalah sebesar 0,589 atau (5,89%) berarti akuntabilitas mempunyai hubungan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 5,89 %, artinya jika ada peningkatan akuntabilitas sebesar 100% maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 5,89%, begitu juga sebaliknya apabila akuntabilitas mengalami penurunan. Jadi akuntabilitas berhubungan positif secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh kebijakan desa (X2) secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat (Y)

Dari hasil pengolahan data pada uji analisis regresi berganda diperoleh nilai koefisien regresi kebijakan desa (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) adalah sebesar 0,281 atau (2,81%) berarti kebijakan desa mempunyai hubungan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 2,81%, artinya jika ada

peningkatan dalam kebijakan desa sebesar 100% maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 2,81%, begitu juga sebaliknya apabila kebijakan desa mengalami penurunan. Jadi kebijakan desa berhubungan positif secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X3) secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat (Y)

Dari hasil pengolahan data pada uji analisis regresi berganda diperoleh nilai koefisien regresi partisipasi masyarakat (X3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) adalah sebesar 0,092 atau (0,92%) berarti partisipasi masyarakat mempunyai hubungan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,92%, artinya jika ada peningkatan partisipasi masyarakat sebesar 100% maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,92%, begitu juga sebaliknya apabila partisipasi masyarakat mengalami penurunan. Jadi partisipasi masyarakat berhubungan positif secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 9. Hasil Uji F

Variabel	F _{tabel}	F _{hitung}	Sig	Keterangan
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	2,46	7,701	0,000	Signifikan

Sumber: Hasil olah data, 2023.

Dari uji F yang tertera pada tabel diatas menyatakan bahwa nilai Ftabel untuk taraf nyata sebesar 5% serta df pembilang k-1 maka 4-1=3 dan df penyebut n-k=80-4=76 adalah sebesar 2,46 dengan kata lain Fhitung > Ftabel (7,701 > 2,46), sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. dari uji F juga diketahui bahwa nilai signifikan yang muncul adalah 0,000 yang berarti Fsig (0,000 < 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat signifikan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.



Tabel 10. Hasil Uji t

Variabel	T _{tabel}	T _{hitung}	Sig.	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	1,665	5,107	0,000	Signifikan
Kebijakan Desa (X2)	1,665	2,296	0,024	Signifikan
Partisipasi Masyarakat (X3)	1,665	0,656	0,514	Tidak signifikan

Berdasarkan tabel 10 diatas pengujian hipotesis antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh akuntabilitas (X1) secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai thitung untuk variabel akuntabilitas sebesar 5,107 sedangkan nilai ttabel 1,665 dan tingkat signifikansi 0,000 serta $df = n-k-1 (80-3-1) = 76$ maka ttabel adalah sebesar 1,665. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima karena nilai thitung > ttabel (5,107 > 1,665) atau tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel akuntabilitas menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.

b. Pengaruh kebijakan desa (X2) secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai thitung untuk variabel kebijakan desa sebesar 2,296 sedangkan nilai ttabel 1,665 dan tingkat signifikansi 0,024 serta $df = n-k-1 (80-3-1) = 76$ maka ttabel adalah sebesar 1,665. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima karena nilai thitung > ttabel (2,296 > 1,665) atau tingkat signifikansi 0,024 < 0,05. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel kebijakan desa menunjukkan bahwa variabel kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.

c. Pengaruh partisipasi masyarakat (X3) secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai thitung untuk variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,656 sedangkan nilai ttabel 1,665 dan tingkat signifikansi 0,514 serta $df = n-k-1 (80-3-1) = 76$ maka ttabel adalah sebesar 1,665. Jadi

dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak karena nilai thitung < ttabel (0,656 < 1,665) atau tingkat signifikansi 0,514 > 0,05. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.

Tabel 11. Hasil Uji R²

R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
0,808 ^a	0,754	0,744	2,251

Sumber: Hasil olah data, 2023.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,744 atau 74,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat mampu menjelaskan sebesar 74,4% terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 25,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

a. Pengaruh Akuntabilitas (X1) Secara Parsial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y).

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan, menggunakan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana aparatur pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan, dan melaporkan kepada masyarakat dan atasan secara tertib atas pelaksanaan setiap kegiatan. Pemerintah melaksanakan ketentuan di atas sesuai dengan undang-undang.

Apabila akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa terpenuhi pada suatu desa maka Rencana pembangunan dan rencana lain pemerintah akan terus berjalan dengan lancar,



secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, begitupun sebaliknya jika akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa menurun, maka kesejahteraan masyarakat akan menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yupita & Juita (2020); Nestiti, *et al.*, (2022); yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh putra (2015) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

b. Pengaruh Kebijakan Desa (X2) Secara Parsial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y).

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan desa merupakan suatu tata aturan yang dibuat dan telah disetujui oleh pemerintah desa dan juga masyarakat. Kebijakan desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih maju dan lebih baik lagi. Kebijakan pemerintah Desa Buntar dalam hal pembangunan fasilitas umum atau sarana dan prasarana sudah sangat baik. Sehingga dapat menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari dan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yupita & Juita (2020); Nestiti, *et al.*, (2022); yang menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian juga dilakukan oleh Kuswanti & Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

c. Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X3) Secara Parsial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y).

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial partisipasi masyarakat tidak berpengaruh

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses kesejahteraan masyarakat, mulai dari partisipasi dan keterlibatan dalam perencanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi, guna mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ini tidak hanya melibatkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran atau kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat dalam kesejahteraan masyarakat masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu yang disebabkan dengan keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidak interaktif, kurangnya kesadaran masyarakat, dan juga pendidikan yang rendah. Dan hal tersebut akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yupita & Juita (2020); Nestiti, *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Julianto dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

5. Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan kebijakan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan Nilai Adjusted R Square adalah 0,744 atau 74,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat mampu menjelaskan sebesar 74,4% terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan sisanya sebesar 25,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model dalam penelitian ini.



6. Keterbatasan Dan Saran

Peneliti sudah melakukan penelitian ini dengan prosedur ilmiah. Akan tetapi masih terdapat beberapa keterbatasan yakni berdasarkan hasil penelitian dari ketiga variabel yang diuji dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yakni akuntabilitas dan kebijakan desa. serta data yang diperoleh dalam penelitian ini hanya sebatas pada hasil pengisian kuesioner.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Diharapkan Pemerintah desa dapat meningkatkan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan dana desa semakin baik. (2) Diharapkan Kebijakan desa yang telah dibuat dan disahkan dapat diterapkan aturan yang harus dilakukan agar pemerintah desa lebih baik. (3) Diharapkan partisipasi masyarakat untuk ditingkatkan lagi sebab Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. (4) Pemerintahan desa diharapkan mampu meningkatkan dan lebih mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa, partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat supaya pengelolaan keuangan desa dan kebijakan desan serta masyarakat dapat merealisasi kesejahteraan masyarakat dengan baik. (5) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah variabel independen yang lebih bervariasi yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

7. Ucapan Terimakasih

Kepada ITB AAS yang telah berkontribusi pada penerbitan jurnal ini, kami menyampaikan terima kasih yang mendalam.

Daftar Pustaka

- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S., 2021. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(1), 85-92.
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129-139.
- Dura, J. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa , Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal JIBEKA*, 10(1), 26-32.
- Fahri, L. N. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi*, 11(1), 75-88.
- Halim, A., 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 17-27.
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S., 2019. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24-42.
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1-22.
- Mulia, R. A., & Saputra, N., 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67-83.



- Nestiti, F. B., Ningsih, S. & Utami, W. K. 2022. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 465-474.
- Novitasari. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. 2019. Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Jurnal Magisma* 7(1): 35-43.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaga Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara*. Lembaga Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rusdiana, A., & Nasihudin. 2018. *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung.
- Yupita, L., & Juita, V., 2020. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 56-64.

